

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Adami Chazawi, 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Bismar Siregar, 1983, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Binacipta.
- C.S.T.Kansil, 1986, *Kitab Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Bina Aksara.
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perara Pidana Buku 2*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni Bandung.
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT. Alumni.
- Romly Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Criminal Justice System: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta: Putra A. Bardin (Anggota IKAPI).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamujdi, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: FH UI Pres.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 perubahan atas Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1998

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012

Internet

icjr.or.id/catatan-terhadap-upaya-huku-yang-dilakukan-oleh-buronandpo-dalam-perkara-pidana-di-indonesia/ diakses pada 23 Januari 2017

<http://mediaindonesia.com/news/read/53580/buronan-leluasa-hindari-hukuman/2016-06-29> diakses 10 Februari 2017

<http://m.cnnindonesia.com/nasional/20140923154200-12-4091/perang-pakar-soal-peninjauan-kembali/> diakses pada tanggal 5 Maret 2017

<http://peunebah.blogspot.com/2011/12/upaya-hukum.html?> diakses 15 April 2017

<http://indekshukum.org/annotation/detail/450b0174-5348-1348-ceb2-303233323431.html> diakses 24 April 2017

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57050cd1350e5/kisah-pengujian-pasal-2-dan-3-uu-tipikor> diakses 30 April 2017

Skripsi

Skripsi Andi Hidayat Nur Putra, 2015, *Kewenangan Pengadilan Memeriksa dan Memutus Gugatan Praperadilan tentang Tidak Sahnya Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel)*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.